

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah dan Perkembangan KPP Madya Malang**

a. Karakteristik Organisasi

Gaung modernisasi membawa perubahan dalam tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Seiring dengan visi dan misi untuk melaksanakan reformasi perpajakan, maka modernisasi administrasi perpajakan digulirkan. Perwujudannya melalui pembentukan Kantor Pelayanan Pajak modern, salah satunya KPP Madya Malang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dimana SMO (Saat Mulai Operasi) ditetapkan mulai tanggal 9 April 2007. Pada masa awal pendirian target penerimaan yang ditetapkan untuk KPP Madya Malang adalah sebesar Rp. 1.818.010,17 (juta) atau sekitar 33,37% dari total penerimaan di Kanwil DJP Jawa Timur III.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-29/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-31/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak Tertentu dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu dalam hal Perubahan Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, ditetapkan bahwa Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan melaporkan usahanya pada KPP Madya Malang adalah sebanyak 990 Wajib Pajak.

Dalam perkembangannya sesuai penetapan Direktur Jenderal Pajak dengan ketetapannya nomor KEP-27/PJ/ 2012 tanggal 30 Januari 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-09/PJ.08/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan usahanya di KPP Madya Malang ditambah menjadi 1592 Wajib Pajak.

b. Karakteristik Wilayah Kerja

Bentangan wilayah kerja KPP Madya Malang adalah seluas wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III yang meliputi 11 Daerah Tingkat II. Batas wilayah kerja KPP Madya Malang sisi utara berbatasan dengan wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur II. Kabupaten Nganjuk menjadi batas sisi Barat Laut sedangkan Kabupaten Pasuruan menjadi batas sisi Timur Laut. Selanjutnya wilayah kerja KPP Madya Malang membentang keseluruhan wilayah Jawa Timur bagian Selatan dengan Kabupaten Tulungagung sebagai batas sisi Barat Daya dan Kabupaten Banyuwangi di sisi Tenggara.

Dengan cakupan wilayah kerja yang demikian luas, tantangan mengalokasi sumberdaya agar dapat melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap Wajib Pajak secara efektif dan efisien menjadi prioritas kerja KPP Madya Malang.

c. Karakteristik Wajib Pajak

Demografi Wajib Pajak berdasarkan tempat kedudukan usaha Wajib Pajak terkonsentrasi di wilayah Malang Raya dan Kota/Kabupaten Pasuruan dengan total 1.082 Wajib Pajak atau sekitar 67.901%. Wilayah ini meliputi 5 Daerah Tingkat II yaitu Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan, sedangkan sisanya tersebar di 6 daerah tingkat II lainnya.

Adapun berdasarkan Kategori Lapangan Usaha (KLU), komposisi Wajib Pajak terdaftar dan melaporkan usahanya di KPP Madya Malang terkonsentrasi sektor perdagangan dan jasa yaitu sekitar 28,77% dan 21,41%. Disusul kemudian sektor industri pengolahan sekitar 12,69%. Namun demikian dari sisi proporsi penerimaan pajak terlihat sangat bertumpu pada sektor industri pengolahan khususnya industri rokok. Dengan total penerimaan pada tahun 2012 dan 2011 sebesar Rp.2.504.485 (juta) dan Rp. 2.168.245 (juta), Industri Pengolahan menyumbangkan penerimaan pada tahun 2012 sebesar RP. 1.596.360 (juta) atau sekitar 63.74%, dan pada tahun 2011 Rp.1.532.129 (juta) atau sekitar 70.66%. Dari total penerimaan industri pengolahan tersebut ternyata sebagian besar merupakan penerimaan dari industri rokok dengan jumlah 80 Wajib Pajak yang menyumbangkan penerimaan dibandingkan penerimaan total sekitar 40,95% pada tahun 2012 dan 47,50% pada tahun 2011.

#### **4.1.2 Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Menurut data dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang tahun 2013, KPP Madya Malang merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang melayani Wajib Pajak Badan tertentu sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Pajak. Wilayah kerja KPP Madya Malang meliputi seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III yaitu mulai Banyuwangi sampai dengan Tulungagung. Oleh karena itu KPP Madya Malang memiliki prinsip utama dalam melayani yaitu “Melayani secara TOTAL” dengan Motto “*SMILE*” yang merupakan kepanjangan dari Senyum, Menyelesaikan Masalah, Ikhlas, Luas Pengetahuan dan memegang teguh kode Etik. Motto ini menjadi panduan strategi untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada wajib pajak yang ada di wilayah KPP Madya Malang pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya.

Melayani dan membimbing seluruh masyarakat dengan sebaik-baiknya merupakan komitmen KPP Madya Malang. Oleh karena itu walaupun wajib pajaknya telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP, Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Madya Malang bisa melayani permohonan NPWP untuk masyarakat umum. Bagi masyarakat yang kartunya hilang atau rusak dapat meminta cetak ulang tanpa dipungut biaya apapun. Ini semua merupakan rangkaian pelayanan yang diberikan oleh KPP Madya Malang dalam rangka melayani wajib pajak untuk mewujudkan masyarakat yang taat pajak dalam rangka bersama mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

#### **4.1.3 Visi dan Misi KPP Madya Malang**

Visi KPP Madya Malang adalah: “Menjadi Kantor Pelayanan Pajak terbaik, yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, dan efisien, dipercaya dan dibanggakan masyarakat”.

Kemudian Misi KPP Madya Malang adalah: “Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang excellent dan adil serta mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan potensi yang ada”

#### 4.1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran secara skema tentang hubungan kerja sama orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka mencapai suatu tujuan, sehingga dengan adanya struktur organisasi diharapkan tujuan organisasi dari instansi tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang adalah sebagai berikut:

**Gambar 4.1**  
**Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang**



Sumber: Data Primer KPP Madya Malang 2014

#### 4.1.5 Uraian Tugas atau Jabatan Unit Organisasi

Setiap bagian yang terdapat pada KPP Madya Malang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda antar satu dengan lainnya. Namun semua bagian tetap harus dapat bekerja sama supaya bisa mewujudkan visi dan misi KPP Madya Malang. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepala Kantor

Kepala kantor mempunyai tugas mengkoordinasikan pelayanan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

##### 2. Subbagian Umum

Di bagian ini, semua kebutuhan kantor ataupun karyawan dikelola, meliputi urusan kepegawaian, keuangan dan rumah tangga diantaranya kenaikan pangkat, disiplin pegawai, penggajian pegawai, cuti, pengadaan sarana/prasarana kantor, dan bahkan obat-obatan bagi pegawai dalam skala kecil juga disediakan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor pun turut menjadi tanggung jawab dari Sub Bagian Umum.

##### 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan urusan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan data, pemeliharaan *Relational Data Base Management System* (RDBMS), pengelolaan

akses dan keamanan sistem komputer, pelayanan dukungan teknis komputer serta melakukan penyiapan, pencetakan dan pengiriman laporan kinerja.

#### 4. Seksi Pelayanan

Melakukan pelayanan Wajib Pajak, penyuluhan ketentuan formal perpajakan, penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) dan surat-surat permohonan (termasuk surat-surat lainnya dari Wajib Pajak), perekaman dokumen, perpajakan (termasuk Surat Pemberitahuan, Surat Setoran Pajak, Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang diuangkan, Putusan Keberatan dan Banding), dan kearsipan berkas Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

#### 5. Seksi Penagihan

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pembuatan usulan peledakan dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

#### 6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (RIKI)

Seksi Pemeriksaan mengelola administrasi kegiatan sebelum maupun setelah pemeriksaan seperti membuat Usulan Pemeriksaan, Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan setelah diperoleh hasil pemeriksaan di input pada Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak (SIMPP). Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang.

## 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang digolongkan dalam 3 (tiga) Kelompok Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yakni, Industri, Perdagangan, dan Jasa. Diantara ketiga kelompok bidang usaha tersebut, sektor Perdagangan merupakan sektor yang dominan dalam memberikan kontribusi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang. Seksi Pengawasan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, pemantauan proses administrasi perpajakan (*workflow*), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan bagi Wajib Pajak, melakukan penerbitan, pembetulan dan penyimpanan produk-produk hukum, serta melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak.

## 8. Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak digunakan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) untuk mendapatkan kualitas hasil pemeriksaan yang optimal dan mempercepat proses pemeriksaan.

## 4.2 Analisis Data Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Responden

Dengan menyebarkan 60 kuesioner kepada wajib pajak di KPP Madya Malang yang diberikan secara langsung dalam waktu 3 minggu yaitu dimulai pada tanggal 19 Mei 2014 sampai 26 Mei 2014, yang tidak lengkap ada 10 kuesioner. Sehingga

hanya ada 50 kuesioner yang bisa dianalisis. Adapun deskripsi responden terlihat pada tabel 4.1 berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Responden**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner disebar	60	100%
2.	Kuesioner tidak lengkap	10	17%
3.	Kuesioner yang di analisis	50	83%

Sumber: Data Primer diolah 2014

#### 4.2.2 Karakteristik Responden

Berdasarkan kuesioner yang dapat dianalisis akan dijabarkan beberapa karakteristik responden dalam penelitian ini yang meliputi jenis usaha, bentuk badan usaha, lama pendirian usaha, dan jumlah pegawai. Adapun uraian dari karakteristik responden adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Usaha

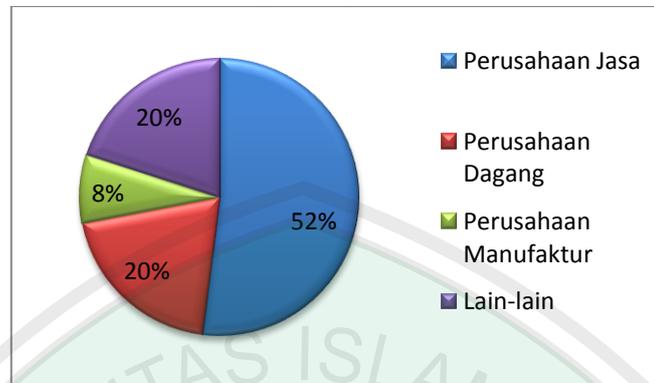
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki jenis usaha di bidang perusahaan jasa yaitu sebanyak 26 responden (52%) dari jumlah 50 responden. Sedangkan di perusahaan dagang ada 10 responden (20%), perusahaan manufaktur 4 responden (8%), dan yang lainnya ada 10 responden (20%). Adapun jenis usaha responden dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Jenis Usaha**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Perusahaan Jasa	26	52%
2.	PerusahaanDagang	10	20%
3.	Perusahaan Manufaktur	4	8%
4.	Lain-lain	10	20%
	Jumlah	50	100%

Sumber: Data Primer diolah 2014

**Gambar 4.2**  
**Jenis Usaha**



Sumber: Data Primer diolah 2014

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa perusahaan jasa memperoleh persentase paling tinggi daripada jenis usaha yang lain yaitu sebesar 52%, sedangkan jenis usaha yang lain tingkat persentasenya di bawah 50%. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Madya Malang mempunyai jenis usaha di bidang jasa.

## 2. Bentuk Badan Usaha

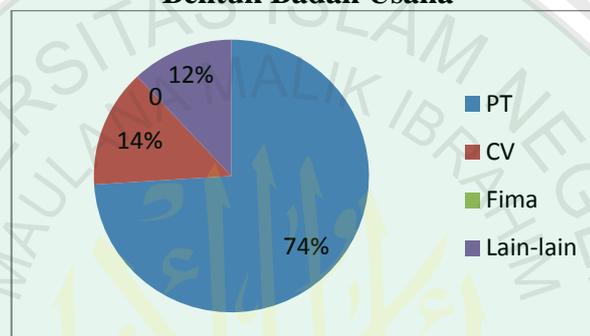
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki bentuk badan usaha berupa PT (Perseroan Terbatas) yaitu sebanyak 37 responden (74%) dari jumlah 50 responden. Sedangkan yang memiliki badan usaha berupa CV ada 7 responden (20%), firmatidak ada (0%), dan yang lainnya ada 6 responden (12%). Adapun bentuk badan usaha responden dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

**Tabel 4.3**  
**Bentuk Badan Usaha**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	PT	37	74%
2.	CV	7	14%
3.	Fima	0	0
4.	Lain-lain	6	12%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah 2014

**Gambar 4.3**  
**Bentuk Badan Usaha**



Sumber: Data Primer diolah 2014

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, dari berbagai macam bentuk badan usaha menunjukkan bahwa PT (Perseroan Terbatas) memperoleh persentase paling tinggi daripada bentuk badan usaha yang lain yaitu sebesar 74%, sedangkan untuk CV, Firma, dan lain-lain hanya memperoleh nilai sebesar 14%, 0%, dan 12%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak di KPP Madya Malang mempunyai bentuk badan usaha berupa PT (Perseroan Terbatas).

### 3. Lama Pendirian Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang dimiliki responden sudah berdiri > 20 tahun yaitu sebanyak 21 responden (42%). Sedangkan perusahaan yang berdiri < 5 tahun ada 3 responden (6%), 5-10 tahun ada 9 responden (18%), dan yang sudah berdiri 10-20 tahun ada 17 responden

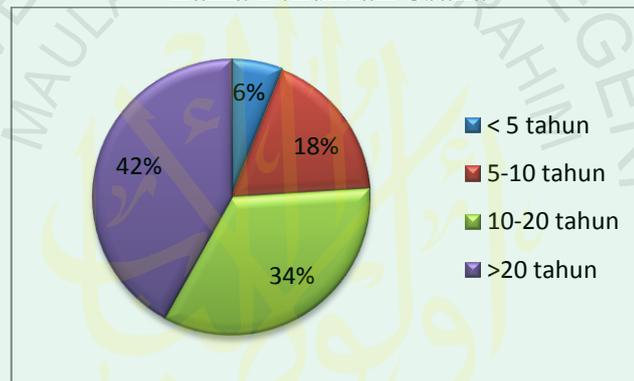
(34%). Adapun lama pendirian perusahaan responden dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

**Tabel 4.4**  
**Lama Pendirian Usaha**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	< 5 tahun	3	6%
2.	5-10 tahun	9	18%
3.	10-20 tahun	17	34%
4.	>20 tahun	21	42%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah 2014

**Gambar 4.4**  
**Lama Pendirian Usaha**



Sumber: Data Primer diolah 2014

Gambar 4.4 di atas adalah lama pendirian perusahaan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa 42% adalah persentase paling tinggi yang pendiriannya >20 tahun. Sedangkan perusahaan yang berdiri antara 10-20 tahun memperoleh persentase 34%, untuk yang berdiri 5-10 tahun adalah 18%, dan kurang dari 5 tahun hanya 6%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Madya Malang rata-rata sudah mempunyai perusahaan yang berumur >20 tahun.

#### 4. Jumlah Pegawai

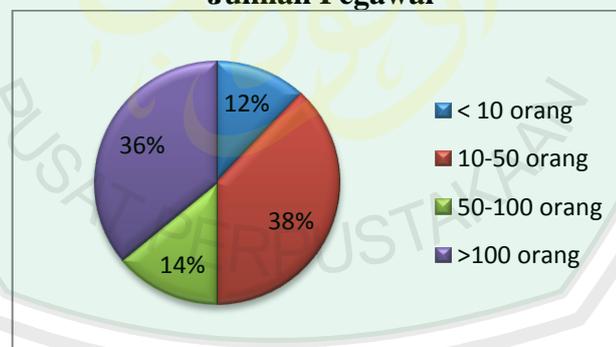
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang dimiliki oleh perusahaan paling banyak adalah 10-50 orang dengan jumlah persentase 38%, kemudian > 100 orang dengan persentase 36%, 50-100 orang dengan persentase 14%, dan yang terakhir < 10 orang dengan persentase 12%. Adapun jumlah pegawai perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Jumlah Pegawai**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	< 10 orang	6	12%
2.	10-50 orang	19	38%
3.	50-100 orang	7	14%
4.	>100 orang	18	36%
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data Primer diolah 2014

**Gambar 4.5**  
**Jumlah Pegawai**



Sumber: Data Primer diolah 2014

Gambar 4.5 di atas menunjukkan berapa banyak rata-rata jumlah pegawai yang ada di perusahaan, dan ternyata jumlah pegawai 10-50 orang mendapat persentase paling tinggi yaitu 38%, sedangkan persentase berikutnya adalah 36% dengan jumlah pegawai lebih dari 100 orang, 14% dengan jumlah pegawai 50-100 orang, dan 12% kurang dari 10 orang pegawai.

### 4.2.3 Karakteristik Variabel Penelitian

Karakteristik variabel penelitian ini akan menjabarkan mengenai item-item dari variabel e-system yaitu *e-registration* (X1), *e-SPT* (X2), *e-filing* (X3), *e-NPWP* (X4), dan penjabaran item variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

#### 1. *e-registration*

Variabel *e-registration* (X1) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel *e-Registration* (X1)**

No	Opsi Jawaban	e-reg1		e.reg2		e.reg3		e.reg4	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	5	10	6	12	7	14	17	34
2.	S	37	74	28	56	20	40	25	50
3.	R	3	6	8	16	11	22	4	8
4.	TS	4	8	6	12	11	22	4	8
5.	STS	1	2	2	4	1	2	0	0
Jumlah		50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Dari tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel *e-registration* (X1) pada item e.reg1 (Perusahaan telah memperoleh sosialisasi mengenai *e-registration*) responden yang menyatakan sangat setuju ada 5(10%), setuju 37(74%), ragu-ragu 3(6%), tidak setuju 4(8%), sangat tidak setuju 1(2%). Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 74%.

Pada item e.reg2 (Perusahaan telah memanfaatkan *e-registration*) responden yang menyatakan sangat setuju 6 (12%), setuju 28 (56%), ragu-ragu 8 (16%), tidak setuju 6 (12%), sangat tidak setuju 2 (4%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 56%.

Kemudian pada item e.reg3 (Lebih memilih mengurus hal yang berkaitan dengan NPWP secara online melalui *e-registration* daripada mengurusnya dengan datang ke KPP) responden yang menyatakan sangat setuju 7 (14%), setuju 20 (40%), ragu-ragu 11 (22%), tidak setuju 11 (22%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 40%.

Sedangkan pada item e.reg4 (*e-registration* sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena sangat efisien waktu, tenaga dan dana) responden yang menyatakan sangat setuju 17 (34%), setuju 25 (50%), ragu-ragu 4 (8%), tidak setuju 4 (8%), sangat tidak setuju 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 50%.

## 2. *e-SPT*

Variabel *e-SPT* (X2) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel *e-SPT* (X2)**

No	Ops Jawaban	e-SPT1		e.SPT2		e.SPT3		e.SPT4	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	16	32	15	30	15	30	15	30
2.	S	32	64	31	62	29	58	32	64
3.	R	2	4	4	8	6	12	3	6
4.	TS	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	STS	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Dari tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel *e-SPT* (X1) pada item e.SPT1 (Perusahaan telah memperoleh sosialisasi mengenai *e-SPT*) responden yang menyatakan sangat setuju 16 orang

(32%), setuju 32 (64%), ragu-ragu 2 (4%), tidak setuju 0%, sangat tidak setuju juga 0%. Dari data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 64%.

Pada item e.SPT2 (Perusahaan telah memanfaatkan *e-SPT*) responden yang menyatakan sangat setuju 15 (30%), setuju 31 (62%), ragu-ragu 4 (8%), tidak setuju dan sangat tidak setuju 0%. Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 62%.

Kemudian pada item e.SPT3 (*e-SPT* meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 15 (30%), setuju 29 (58%), ragu-ragu 6 (12%), tidak setuju 0%, sangat tidak setuju juga 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 58%.

Sedangkan pada item e.SPT4 (*e-SPT* sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena sangat efisien waktu, tenaga dan dana) responden yang menyatakan sangat setuju 15 (30%), setuju 32 (64%), ragu-ragu 3 (6%), tidak setuju 0%, sangat tidak setuju 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 50%.

### 3. *e-filling*

Variabel *e-filling* (X3) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel *e-filling* (X3)**

No	Opsi Jawaban	e.filling1		e.filling2		e.filling3		e.filling4	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	10	20	5	10	8	16	13	26
2.	S	32	64	24	48	20	40	25	50
3.	R	7	14	12	24	10	20	8	16
4.	TS	1	2	7	14	10	20	4	8
5.	STS	0	0	2	4	2	4	0	0
Jumlah		50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Dari tabel 4.8 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel *e-filling* (X3) pada item e.filling1 (Perusahaan telah memperoleh sosialisasi mengenai *e-filling*) responden yang menyatakan sangat setuju 10 orang (20%), setuju 32 (64%), ragu-ragu 7 (14%), tidak setuju 1 (2%), sangat tidak setuju 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 64%.

Pada item e.filling2 (Perusahaan telah memanfaatkan *e-filling*) responden yang menyatakan sangat setuju 5 (10%), setuju 24 (48%), ragu-ragu 12 (24%), tidak setuju 7 (14%), dan sangat tidak setuju 2 (4%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 48%.

Kemudian pada item e.filling3 (Lebih memilih menyampaikan *e-SPT* secara *e-filling* daripada menyampaikan blanko SPTnya secara langsung ke KPP) responden yang menyatakan sangat setuju 8 (16%), setuju 20 (40%), ragu-ragu 10 (20%), tidak setuju 10 (20%), sangat tidak setuju 2 (4%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 40%.

Sedangkan pada item e.filling4 (*e-filling* sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena sangat efisien waktu, tenaga dan dana) responden yang menyatakan sangat

setuju 13 (26%), setuju 25 (50%), ragu-ragu 8 (16%), tidak setuju 4 (8%), sangat tidak setuju 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 50%.

#### 4. *e*-NPWP

Variabel *e*-NPWP (X4) terdiri dari 4 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel *e*-NPWP (X4)**

No	Opsi Jawaban	e-NPWP1		e.NPWP2		e.NPWP3		e.NPWP4	
		Orang	%	Orang	%	Orang	%	Orang	%
1.	SS	7	14	5	10	7	14	13	26
2.	S	26	52	25	50	23	46	24	48
3.	R	10	20	11	22	11	22	9	18
4.	TS	4	8	6	12	6	12	3	6
5.	STS	3	6	3	6	3	6	1	2
Jumlah		50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel *e*-NPWP (X4) pada item e.NPWP1 (Perusahaan telah memperoleh sosialisasi mengenai *e*-NPWP) responden yang menyatakan sangat setuju 7 orang (14%), setuju 26 (52%), ragu-ragu 10 (20%), tidak setuju 4 (8%), dan sangat tidak setuju 3 (6%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 52%.

Pada item e.NPWP2 (Perusahaan telah memanfaatkan *e*-NPWP) responden yang menyatakan sangat setuju 5 (10%), setuju 25 (50%), ragu-ragu 11 (22%), tidak setuju 6 (12%), dan sangat tidak setuju 3 (6%). Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 50%.

Kemudian pada item e.NPWP3 (Lebih memilih mengurus hal yang berkaitan dengan NPWP secara online melalui e-NPWP daripada mengurusnya dengan datang langsung ke KPP) responden yang menyatakan sangat setuju 7 (14%), setuju 23 (46%), ragu-ragu 11 (22%), tidak setuju 6 (12%), sangat tidak setuju 3 (6%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 46%.

Sedangkan pada item e.NPWP4 (e-NPWP sangat bermanfaat bagi wajib pajak karena sangat efisien waktu, tenaga dan dana) responden yang menyatakan sangat setuju 13 (26%), setuju 24 (48%), ragu-ragu 9 (18%), tidak setuju 3 (6%), sangat tidak setuju 1 (2%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 48%.

#### 5. Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdiri dari 5 item pertanyaan dengan distribusi jawaban responden sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Jawaban Responden untuk Variabel Kepatuhan WP (Y)**

No	Ops Jawaban	KWP1		KWP2		KWP3		KWP4		KWP5	
		Orang	%								
1.	SS	23	46	22	44	18	36	7	14	14	28
2.	S	27	54	28	56	29	58	23	46	17	34
3.	R	0	0	0	0	2	4	13	26	4	8
4.	TS	0	0	0	0	1	2	7	14	15	30
5.	STS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Dari tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa distribusi jawaban responden untuk variabel Kepatuhan wajib pajak (Y) pada item KWP1 (Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sebelum jatuh tempo)

responden yang menyatakan sangat setuju 23 orang (46%), setuju 27 (54%), ragu-ragu 0%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju juga 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 54%.

Pada item KWP2 (Wajib Pajak mengisi SPT (baik SPT Tahunan maupun SPT Masa) dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang perpajakan) responden yang menyatakan sangat setuju 22 (44%), setuju 28 (56%), ragu-ragu 0%, tidak setuju 0%, dan sangat tidak setuju juga 0%. Pada item ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase sebesar 56%.

Kemudian pada item KWP3 (SPT harus diisi sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya (sesuai dengan jumlah pajak yang terutang sebenarnya) oleh Wajib Pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 18 (36%), setuju 29 (58%), ragu-ragu 2 (4%), tidak setuju 1 (2%), sangat tidak setuju 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 58%.

Sedangkan pada item KWP4 (Kompleksitas formulir SPT menjadi kendala bagi Wajib Pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 7 (14%), setuju 23 (46%), ragu-ragu 13 (26%), tidak setuju 7 (14%), sangat tidak setuju 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 46%.

Dan pada item KWP5 (Jarak antara tempat usaha Wajib Pajak dengan tempat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang jauh menjadi kendala bagi Wajib Pajak) responden yang menyatakan sangat setuju 14 (28%), setuju 17

(34%), ragu-ragu 4 (8%), tidak setuju 15 (30%), sangat tidak setuju 0%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju dengan persentase 34%.

#### 4.2.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas dengan tujuan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut valid dan reliabel, Sehingga kuesioner layak atau tidak untuk digunakan dalam suatu penelitian.

##### 4.2.4.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika tingkat signifikansinya berada di bawah 0,05. (Ghozali, 2012:52). Hasil analisis validitas tampak seperti tabel 4.11 berikut ini:

**Tabel 4.11**  
**Uji Validitas variabel *e-registration* (X1)**

Pertanyaan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
e.reg1	0.000	0.790	Valid
e.reg2	0.000	0.869	Valid
e.reg3	0.000	0.771	Valid
e.reg4	0.000	0.732	Valid

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa variabel *e-registration* (X1) mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 yaitu e.reg1 sebesar 0.000,

e.reg2 sebesar 0.000, e.reg3 sebesar 0.000, dan e.reg4 sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan tersebut adalah valid.

**Tabel 4.12**  
**Uji Validitas variabel *e-SPT (X2)***

<b>Pertanyaan</b>	<b>Sig</b>	<b>Pearson Correlation</b>	<b>Keterangan</b>
e.SPT1	0.000	0.828	Valid
e.SPT2	0.000	0.816	Valid
e.SPT3	0.000	0.804	Valid
e.SPT4	0.000	0.855	Valid

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa variabel *e-SPT (X2)* berada pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu e.SPT1 sebesar 0.000, e.SPT2 sebesar 0.000, e.SPT3 sebesar 0.000, dan e.SPT4 sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan tersebut adalah valid.

**Tabel 4.13**  
**Uji Validitas variabel *e-Filling (X3)***

<b>Pertanyaan</b>	<b>Sig</b>	<b>Pearson Correlation</b>	<b>Keterangan</b>
e.filling1	0.000	0.524	Valid
e.filling2	0.000	0.882	Valid
e.filling3	0.000	0.919	Valid
e.filling4	0.000	0.857	Valid

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.13 di atas menunjukkan bahwa variabel *e-filling (X3)* berada pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu e.filling1 sebesar 0.000, e.filling2 sebesar 0.000, e.filling3 sebesar 0.000, dan e.filling4 sebesar 0.000. Hal ini dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan tersebut adalah valid.

**Tabel 4.14**  
**Uji Validitas variabel *e-NPWP (X4)***

<b>Pertanyaan</b>	<b>Sig</b>	<b>Pearson Correlation</b>	<b>Keterangan</b>
e.NPWP1	0.000	0.834	Valid
e.NPWP2	0.000	0.901	Valid
e.NPWP3	0.000	0.812	Valid
e.NPWP4	0.000	0.792	Valid

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan tabel di atas (tabel 4.14) menunjukkan bahwa variabel *e*-NPWP (X4) berada pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu *e*.NPWP1 sebesar 0.000, *e*.NPWP2 sebesar 0.000, *e*.NPWP3 sebesar 0.000, dan *e*.NPWP4 sebesar 0.000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua butir pertanyaan tersebut adalah valid.

**Tabel 4.15**  
**Uji Validitas variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Pertanyaan	Sig	Pearson Correlation	Keterangan
KWP1	0.000	0.596	Valid
KWP2	0.000	0.745	Valid
KWP3	0.000	0.658	Valid
KWP4	0.000	0.648	Valid
KWP5	0.000	0.772	Valid

Sumber: Data primer diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) berada pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 yaitu KWP1 sebesar 0.000, KWP2 sebesar 0.000, KWP3 sebesar 0.000, dan KWP4 sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan tersebut adalah valid.

Dari kelima tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada variabel X1 (*e-registration*), X2 (*e-SPT*), X3 (*e-filling*), X4 (*e-NPWP*) terhadap Y (Kepatuhan wajib pajak) berada pada tingkat signifikansi di bawah 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut adalah valid.

#### 4.2.4.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2012:47) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner dikatakan reliabel (layak) jika *cronbach's alpha* > 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika *cronbach's alpha* < 0,60. Hasil analisis reliabilitas tampak pada tabel 4.16 berikut ini:

**Tabel 4.16**  
**Uji Reliabilitas**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	e.regX1	0,796	Reliabel
2.	e.SPTX2	0,842	Reliabel
3.	e.fillingX3	0,824	Reliabel
4.	e.NPWPX4	0,855	Reliabel
5.	KWPY	0,667	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel *e-registration* (X1) diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,796. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel *e-registration* (X1) dapat dikatakan reliabel.
2. Variabel *e-SPT* (X2) diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,842. Artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel *e-SPT* (X2) dapat dikatakan reliabel.
3. Variabel *e-filling* (X3) juga diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,824. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 artinya item pernyataan untuk variabel *e-filling* (X3) dapat dikatakan reliabel.
4. Variabel *e-NPWP* (X4) mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,855. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel *e-NPWP* (X4) dapat dikatakan reliabel.

5. Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,667. Nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga item pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dikatakan reliabel.

#### **4.2.5 Uji Asumsi Klasik**

Penguji menggunakan analisis data dengan pengujian asumsi klasik sebagai berikut:

##### **4.2.5.1 Uji Normalitas Data**

Menurut Ghozali (2012: 160), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

Data pengambilan keputusan normalitas data yaitu jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka regresi tersebut memenuhi normalitas, sedangkan jika data menyebar lebih jauh dan tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil analisis normalitas data terlihat pada tabel 4.17 berikut ini:

**Tabel 4.17**  
**Uji Normalitas Data**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.30077245
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		.776
Asymp. Sig. (2-tailed)		.584

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Lampiran 9

Dari hasil pengujian normalitas di atas, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,584 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,584 > 0,05$ ), dari hasil tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normal.

#### 4.2.5.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2012:105-106) Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.18**  
**Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
e.regX1	.349	2.864	Non Multikolinearitas
e.SPTX2	.690	1.449	Non Multikolinearitas
e.fillingX3	.370	2.706	Non Multikolinearitas
e.NPWPX4	.332	3.010	Non Multikolinearitas

a. Dependent Variable: KWPY

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, maka dapat diketahui nilai VIF dan *Tolerance* untuk masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

- Nilai VIF untuk variabel *e-registration* sebesar  $2,864 < 10$ , sedangkan untuk nilai *tolerance* nya sebesar 0,349 artinya angka tersebut mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *e-registration* tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- Nilai VIF untuk variabel *e-SPT* sebesar  $1,449 < 10$ , sedangkan untuk nilai *tolerance* nya sebesar 0,690 artinya angka tersebut mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *e-SPT* tidak terjadi gejala multikolinieritas.
- Nilai VIF untuk variabel *e-filling* sebesar  $2,706 < 10$ , Sedangkan untuk nilai *tolerance* nya sebesar 0,370 artinya angka tersebut mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *e-filling* tidak terjadi gejala multikolinieritas.

d) Nilai VIF untuk variabel *e*-NPWP sebesar  $3,010 < 10$ , Sedangkan untuk nilai *tolerance* nya sebesar 0,332 artinya angka tersebut mendekati angka 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel *e*-NPWP tidak terjadi gejala multikolinieritas.

#### 4.2.5.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2012:139) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya adalah Uji Glejser yang mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan uji glejser, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.19**  
**Uji heterokedastisitas**

Variabel Bebas	T	Sig	Keterangan
<i>e</i> -regX1	0,489	0,627	Homoskedastisitas
<i>e</i> -SPTX2	-1,330	0,190	Homoskedastisitas
<i>e</i> -FillingX3	1,142	0,260	Homoskedastisitas
<i>e</i> -NPWPX4	-1,342	0,186	Homoskedastisitas

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa variabel yang diuji tidak mengandung heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, karena nilai *e*.regX1 sebesar 0,627, *e*.SPTX2 sebesar 0,190, *e*.fillingX3 sebesar 0,260, dan *e*.NPWPX4

sebesar 0,186. Dari keempat variabel bebas tersebut semua nilai signifikansinya  $> 0,50$ . Jadi persamaan regresi tersebut tidak mengandung heterokedastisitas atau homoskedastisitas.

#### 4.2.5.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji *Durbin Watson*, dengan membandingkan nilai *Durbin Watson* hitung (d) dengan nilai *Durbin Watson* tabel, yaitu batas atas ( $d_u$ ) dan batas bawah ( $d_L$ ). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali, 2012: 110-111) :

1. Jika  $0 < d < d_L$ , maka terjadi autokorelasi positif.
2. Jika  $d_L < d < d_u$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
3. Jika  $d - d_L < d < 4$ , maka terjadi autokorelasi negatif.
4. Jika  $4 - d_u < d < 4 - d_L$ , maka tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.
5. Jika  $d_u < d < 4 - d_u$ , maka tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

Hasil analisis yang diperoleh terlihat pada tabel 4.20 berikut ini:

**Tabel 4.20**  
**Uji Autokorelasi**  
**Model Summary<sup>p</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.556 <sup>a</sup>	.310	.247	2.30737	1.945

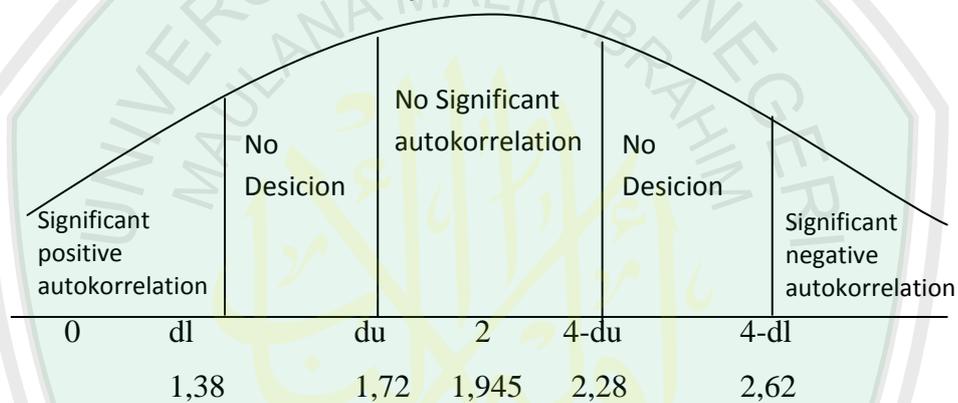
a. Predictors: (Constant), e.NPWPX4, e.SPTX2, e.fillingX3, e.regX1

b. Dependent Variable: KWPY

Sumber: Lampiran 10

Dari output SPSS di atas diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,945 dan sesuai dengan tabel *Durbin-Watson* nilai  $d_u$  sebesar 1,72. Karena nilai  $d_u < dw$  yaitu  $1,72 < 1,945$  maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi. Sesuai dengan kaidah keputusan *Durbin-Watson* jika tidak ada masalah autokorelasi maka  $d_u < dw < 4-d_u$  adalah  $1,72 < 1,945 < 2,28$  atau seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 4.6**  
**Uji Autokorelasi**



#### 4.2.6 Uji Hipotesis

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diproses kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka dengan menggunakan SPSS 17.0 *for Windows* seperti berikut ini:

##### 4.2.6.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh teknologi informasi (*e-system*) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

**Tabel 4.21**  
**Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Keputusan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	11.219	3.990		2.812	.007	
e.regX1	-.337	.176	-.408	-1.922	.061	Tidak Signifikan
e.SPTX2	.809	.205	.596	3.956	.000	Signifikan
e.fillingX3	.120	.177	.140	.680	.500	Tidak Signifikan
e.NPWPX4	.040	.169	.052	.239	.813	Tidak Signifikan
R = 0,556 R Square = 0,310 Adjusted R Square = 0,247 F <sub>hitung</sub> = 4,932 F <sub>tabel</sub> = 2,58 Sig. F = 0,002 α = 5%						

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Berdasarkan data hasil bregresi yang ditunjukkan pada tabel 4.21 di atas, dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 11,219 - 0,337X_1 + 0,809X_2 + 0,120X_3 + 0,040X_4 + 3,990$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diartikan bahwa:

#### 1. Konstanta

Nilai konstanta dari persamaan regresi ini sebesar 11,219 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-NPWP* maka kepatuhan wajib pajak sebesar 11,219.

#### 2. Koefisien Variabel X1 (*e-registration*)

Nilai dari koefisien regresi X1 sebesar -0,337 menyatakan bahwa apabila *e-registration* naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar

0,337 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

### 3. Koefisien Variabel X2 (*e-SPT*)

Nilai dari koefisien regresi X2 sebesar 0,809 menyatakan bahwa apabila *e-SPT* naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,809 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

### 4. Koefisien Variabel X3 (*e-filling*)

Nilai dari koefisien regresi X3 sebesar 0,120 menyatakan bahwa apabila *e-filling* naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,120 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

### 5. Koefisien Variabel X4 (*e-NPWP*)

Nilai dari koefisien regresi X4 sebesar 0,040 menyatakan bahwa apabila *e-NPWP* naik satu-satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0,040 satuan, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di anggap konstan.

#### 4.2.6.2 Koefisien Determinan ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2012: 97).

Untuk melihat hubungan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel independent (*e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-NPWP*) dan variabel dependent (kepatuhan wajib pajak) dapat dilihat dari hasil koefisien determinasi.

Berdasarkan tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* (Koefisien Determinasi) sebesar 0,247 atau 24,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menjelaskan variabel independent *e-registration* (X1), *e-SPT* (X2), *e-filling* (X3), dan *e-NPWP* (X4) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 24,7%, sedangkan sisanya 100%-24,7% adalah 75,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar 4 variabel bebas tersebut yang tidak dimasukkan dalam model.

#### 4.2.6.3 Uji Statistik F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2012: 98) :

- Jika nilai F lebih besar dari 4 maka  $H_0$  ditolak pada derajat kepercayaan 5%.  
Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternaif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

- Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ .

Berdasarkan tabel 4.21 dalam model ANOVA diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 4,932 dengan tingkat signifikansi 0.002 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2,58. Karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $4,932 > 2,58$ ) maka variabel  $e.regX1$ ,  $e.SPTX2$ ,  $e.fillingX3$ , dan  $e.NPWPX4$  secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

#### 4.2.6.4 Uji Statistik t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu *e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-NPWP* terhadap variabel dependennya, yaitu kepatuhan wajib pajak. Pengambilan keputusan didasarkan pada probabilitas signifikansi 0,05 (5%). (Ghozali, 2012:99)

Berdasarkan tabel 4.21 nilai signifikansi masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut :

##### a) Pengaruh *e-registration* (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji statistik t terhadap variabel independen X1 memperlihatkan bahwa variabel *e-registration* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.061 lebih besar dari nilai  $\alpha$  0.05 ( $0.061 > 0.05$ ). Pengujian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-registration* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b) Pengaruh *e-SPT* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji statistik t terhadap variabel independen X2 memperlihatkan bahwa variabel *e-SPT* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai *alpha* 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c) Pengaruh *e-filling* (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji statistik t terhadap variabel independen X3 memperlihatkan bahwa variabel *e-filling* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.500 lebih besar dari nilai *alpha* 0.05 ( $0.500 > 0.05$ ). Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *e-filling* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d) Pengaruh *e-NPWP* (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji statistik t terhadap variabel independen X4 memperlihatkan bahwa variabel *e-NPWP* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.813 lebih besar dari nilai *alpha* 0.05 ( $0.813 > 0.05$ ). Hal ini dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel *e-NPWP* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.2.7 Pengaruh Dominan Variabel Independen (X)

Untuk menguji variabel dominan, terlebih dahulu diketahui kontribusi masing-masing variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat. Kontribusi masing-masing variabel diketahui dari koefisien determinasi regresi sederhana terhadap variabel terikat atau diketahui dari kuadrat korelasi sederhana variabel bebas dan terikat. Berikut adalah hasil analisis pengaruh dominan variabel independent yang terlihat pada tabel 4.22:

**Tabel 4.22**  
**Pengaruh Dominan Variabel Independent (X)**

Variabel	R	r <sup>2</sup>	Kontribusi (%)
<i>e-reg</i> X1	-0,044	0,0019	0,19
<b><i>e-SPT</i>X2</b>	<b>0,484</b>	<b>0,2342</b>	<b>23,42</b>
<i>e-filling</i> X3	0,065	0,0042	0,42
<i>e-NPWP</i> X4	-0,120	0,0144	1,44

Sumber: Data Primer Diolah 2014

Berdasarkan tabel 4.22 di atas, diketahui bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel dependent (Y) adalah variabel *e-SPT* (X2) yaitu memiliki kontribusi sebesar 23,42%. Sedangkan untuk variabel *e-registration* (X1) memiliki kontribusi sebesar 0,19%, *e-filling* (X3) sebesar 0,42%, dan *e-NPWP* (X4) sebesar 1,44%.

#### 4.3 Pembahasan Data Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa variabel independen (*e-registration*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-NPWP*) secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Kemudian untuk hasil analisis secara parsial (uji t) pembahasan masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Dari hasil regresi berganda dapat disimpulkan bahwa *e-registration* tidak memiliki pengaruh yang positif dan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena dari hasil penelitian di KPP Madya Malang dapat diketahui bahwa penerapan *e-registration* masih mempunyai banyak kendala yaitu masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang penggunaan *e-system* berupa *e-registration* ini, meskipun *e-registration* sudah didesain dengan sederhana agar

wajib pajak tidak bingung, namun ternyata masih banyak kesalahan yang ditemukan. Kendala inilah yang membuat wajib pajak lebih memilih untuk datang langsung ke KPP setempat, dan hal ini yang membuat *e-registration* belum bisa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Malang.

Kemudian untuk variabel *e-SPT* berdasarkan hasil regresi berganda memiliki pengaruh positif dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dari hasil uji t (*t-test*) dapat dilihat nilai signifikansinya sebesar 0,000. Dan nilai signifikansi t lebih kecil dari 5% (0,05) ( $0,000 < 0,05$ ). Dari hasil tersebut berarti hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh dominan yaitu *e-SPT* terhadap kepatuhan wajib pajak adalah benar, karena wajib pajak bisa memanfaatkan *e-SPT* untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara elektronik sehingga lebih mudah, cepat, dan aman. *e-SPT* juga bisa meminimalkan kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Afia Sari, Agus Bandang, dan Yohanis Rura pada tahun 2013 yang menyimpulkan bahwa Penerapan sistem *electronic* meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang menyampaikan SPT. Dengan menggunakan *e-SPT* menunjukkan peningkatan 9,3% dibandingkan dengan sebelum penerapan *e-SPT*.

Untuk penggunaan *e-filing* di KPP Madya Malang ini belum begitu berpengaruh bagi wajib pajak, karena berdasarkan hasil analisis regresi berganda nilai signifikansi *e-filing* sebesar  $0,500 > 0,05$ . Padahal *e-filing* ini dibuat dengan tujuan supaya wajib pajak lebih mudah dan tepat waktu dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya, namun ternyata tujuan dari dibuat

sistem *e-filling* ini masih belum begitu dipahami dan disadari oleh wajib pajak karena masih banyak yang beranggapan bahwa *e-system* dari pajak ini sangat ribet dan sulit dimengerti, sehingga mereka lebih suka datang langsung ke KPP atau menggunakan jasa pos untuk melaporkan SPT. Dan untuk mendapatkan aplikasi *e-filling* ini harus bekerjasama dengan ASP yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan harus mengeluarkan biaya untuk mendapat aplikasi *e-SPT* dan *e-filling*.

Sedangkan variabel *e-NPWP* ini juga belum bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena masih banyak wajib pajak yang belum mengenal adanya sistem *e-NPWP* sehingga jarang wajib pajak yang menggunakan sistem ini. Sebagian besar wajib pajak hanya mengenal *e-SPT*, *e-filling*, dan *e-registration* saja. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari KPP terhadap wajib pajak tentang manfaat dan penggunaan *e-system* ini. Disamping itu juga masih banyak perusahaan yang tidak mau ribet dalam menggunakan *e-system* ini, karena banyak perusahaan yang lebih suka meminta karyawannya untuk daftar NPWP sendiri di KPP setempat.